

Kapitalisme, *Mikonka*, dan Kerentanan *Human Security* di Jepang

Ahmad Majdi, Imam Fadhil Nugraha

Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

ARTICLE INFO

Article history:

Received 20 May 2026

Revised 25 May 2026

Accepted 30 May 2026

Available online 05 June 2026

Keywords:

capitalism, demography, human security, Japan, mikonka

Keywords:

demografi, human security, Jepang, kapitalisme, mikonka



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This study examines the phenomenon of “mikonka”—the rising trend of remaining unmarried among the Japanese population—through the lens of human security, positioning capitalism not as the sole cause but as an enabling structure that reshapes the conditions under which individuals make decisions regarding marriage. This study will employ a qualitative approach with a descriptive-analytical design and a single case study of Japan as the primary unit of analysis, covering the time period from the 1990s to the 2020s. The data used were collected through document analysis of academic literature, official government publications, and reports from international institutions, and analyzed using an emancipatory human security framework combined with the protection-empowerment pillars of CHS 2003, Giddens’ structuration theory, and the concept of enabling structures at four levels: material, normative, ideological, and institutional. The findings indicate that capitalism transforms marriage from a social norm into a high-risk economic project through the precariousness of work, while simultaneously commodifying relational needs through alternative markets, as empirically evidenced by the solo economy projected to exceed 100

trillion yen and the AI companion market reaching 2,167.6 million USD by 2025. This study also finds that mikonka produces slow violence against human security across three dimensions: living insecurity that threatens economic security, kodokushi as a systemic indicator of weakened personal security, and atomization that erodes community security. Projectively, the state’s regulatory response has proven inadequate because it operates at the level of individual incentives without addressing structural roots, as evidenced by the decline in Japan’s TFR amidst the most expansive family policies in East Asia.

ABSTRAK

Abstrak: Penelitian ini mengkaji fenomena *mikonka* yakni meningkatnya tren tidak menikah di kalangan masyarakat Jepang melalui perspektif *human security*, dengan memposisikan kapitalisme bukan sebagai penyebab tunggal melainkan sebagai *enabling structure* yang menciptakan ulang kondisi-kondisi di mana keputusan individu terkait pernikahan diambil. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis dan studi kasus tunggal Jepang sebagai unit analisis utama, dengan rentang waktu pada tahun 1990-an hingga 2020-an. Data yang digunakan dikumpulkan melalui analisis dokumen dari literatur akademik, publikasi resmi pemerintah, dan laporan lembaga internasional, serta dianalisis menggunakan kerangka *human security* emansipatoris yang dikombinasikan dengan pilar *protection-empowerment* CHS 2003, teori strukturasi Giddens, dan konsep *enabling structure* pada empat level: material, normatif, ideologis, dan institusional. Temuan menunjukkan bahwa kapitalisme mentransformasi pernikahan dari norma sosial menjadi proyek ekonomi berisiko tinggi melalui prekarisasi kerja, sekaligus mengkomodifikasi kebutuhan relasional melalui pasar alternatif, dibuktikan secara empiris oleh *solo economy* diproyeksikan melampaui 100 triliun yen dan pasar *AI companion* yang mencapai 2.167,6 juta USD pada tahun 2025. Penelitian ini juga menemukan bahwa *mikonka* memproduksi *slow violence* terhadap *human security* pada tiga dimensi: *living insecurity* yang mengancam keamanan ekonomi, *kodokushi* sebagai indikator sistemik oelemahan keamanan personal, dan atomisasi yang mengikis keamanan komunitas. Secara proyektif, respons regulasi negara terbukti tidak memadai karena beroperasi pada level insentif individual tanpa menyentuh akar struktural, sebagaimana dibuktikan oleh penurunan TFR di Jepang di tengah kebijakan keluarga paling ekspansif di Asia Timur.

PENDAHULUAN

Kapitalisme saat ini telah menjadi sistem ekonomi politik yang mendominasi hampir seluruh tatanan global. Semenjak perang dingin berakhir, kapitalisme tidak hanya mengubah dan membentuk ulang hubungan antarnegara, tetapi juga mempengaruhi dan mengubah hingga ke

struktur kehidupan sosial masyarakat secara personal, bahkan hingga mempengaruhi keputusan individu untuk menikah atau tidak menikah. Pernikahan yang sebelumnya merupakan tanda kedewasaan seseorang. Di mana ketika seseorang telah menikah, seseorang itu dapat dikatakan siap secara fundamental dari segi finansial, mental, dan emosional untuk menanggung tanggung jawab dirinya sendiri dan juga keluarganya nanti (Davika, 2021, p. 2,7). Namun kini pengertian tersebut mengalami pergeseran makna yang fundamental. Kapitalisme dengan membawa nilai nilai produktivitas, efisiensi, dan mengejar pencapaian secara perlahan menggeser nilai nilai tradisional seperti menikah dan memulai keluarga (Muhammadun & Fauzi, 2025, p. 1). Pernikahan dianggap dan dipandang sebagai norma sosial yang bersifat universal karena dapat ditemukan di berbagai peradaban manusia, namun dewasa ini mengalami perubahan definisi. Namun perlu ditekankan bahwa kapitalisme tidak bekerja dengan cara melarang atau mencegah individu untuk menikah secara langsung, melainkan dengan merekonstruksi kondisi-kondisi struktural dimana keputusan itu diambil, mengubah rasionalitas, memperluas individualisasi, hingga mengkomodifikasi kebutuhan-kebutuhan relasional yang sebelumnya hanya dapat dipenuhi melalui institusi pernikahan. Dengan mekanisme inilah kemudian kapitalisme berperan sebagai *enabling structure* alih-alih sebagai faktor tunggal, struktur yang menjadikan pilihan untuk tidak menikah semakin rasional, dapat diterima, dan bahkan strategis bagi individu dalam kehidupan modern

Jepang sebagai salah satu negara maju dengan kemampuan industrial yang luar biasa menjadi salah satu contoh paling nyata dari bagaimana kapitalisme mengubah pola kehidupan masyarakat. Dalam periode beberapa dekade terakhir, Jepang mengalami penurunan signifikan dalam sektor pernikahan, di mana masyarakat di Jepang lebih memilih untuk menunda pernikahan atau memutuskan untuk tidak menikah sama sekali. Hal ini kemudian menjadi tren yang kemudian berkembang pesat dan meluas secara masif sehingga para ahli kemudian sepakat menyebut fenomena ini sebagai *mikonka*. Istilah ini muncul dari bahasa Jepang itu sendiri, *mikonka* terdiri dari kanji “*Mi*” yang artinya belum, “*Kon*” yang artinya menikah dan terakhir yaitu “*Ka*” yang artinya tendensi atau kecenderungan untuk melakukan sesuatu, yang jika disatukan berarti mengacu pada meningkatnya jumlah individu usia dewasa yang memutuskan untuk menunda pernikahan atau tidak menikah (Malang International School, 2018). Namun perlu ditegaskan sejak awal bahwa *mikonka* tidak dapat dijelaskan semata-mata melalui kapitalisme saja. Pertanyaan yang kemudian timbul adalah: mengapa negara-negara kapitalis lain tidak mengalami *mikonka* separah Jepang? hal ini bisa berindikasi bahwa ada sesuatu yang bersifat khusus dalam konteks Jepang dimana sebuah interaksi kompleks antara kapitalisme dengan faktor-faktor sosial-budaya yang sangat spesifik yang membuat *mikonka* menjadi fenomena yang begitu masif di negara ini dan tidak dapat dipahami tanpa mempertimbangkan keduanya secara bersamaan.

Faktor-faktor khas Jepang tersebut bahkan telah berakar jauh sebelum kapitalisme modern masuk ke Jepang. Sistem *ie* (家) atau sistem keluarga tradisional Jepang menempatkan garis keturunan, otoritas patriarkal, dan kewajiban finansial sebagai fondasi organisasi sosial dan menciptakan ekspektasi pernikahan yang sangat spesifik dan terstruktur secara hierarkis, di mana pernikahan bukan hanya dipandang sebagai persoalan dua individu semata, melainkan juga sebagai keputusan keluarga besar yang menyangkut keberlangsungan nama dan harta. Menurut (Wedayanti & Dewi, 2021, p. 92) sistem *ie* ini menempatkan laki-laki sebagai pewaris utama yang bertanggung jawab atas keberlangsungan keluarga, pengelolaan ekonomi rumah tangga, hingga pemeliharaan nama baik keluarga besar. Dalam konteks tersebut, pernikahan tidak hanya dipahami sebatas relasi sosial, melainkan sebagai institusi sosial yang erat kaitannya dengan tuntutan ekonomi, tanggung jawab hierarkis, dan kewajiban antargenerasi. Sehingga kemudian kondisi ini menciptakan tekanan sosial yang sangat tinggi pada individu, dimana laki-laki dituntut untuk harus mencapai stabilitas ekonomi sebelum menikah, sementara perempuan juga dihadapkan pada ekspektasi domestik dan subordinasi dalam struktur keluarga tradisional Jepang. Hingga kemudian pada akhirnya sistem ini dihapuskan pasca Perang Dunia II, namun dampak atau residunya dalam ekspektasi sosial terhadap pernikahan masih bisa dirasakan hingga saat ini. Dalam praktiknya, nilai-nilai dalam sistem *ie* juga tercermin melalui budaya *omiai*, yaitu perjodohan formal yang tidak semata didasarkan pada relasi emosional antarindividu,

tetapi juga kerap kali mempertimbangkan status sosial, latar belakang keluarga, stabilitas ekonomi, dan keberlangsungan keluarga besar. Dengan demikian pernikahan dalam masyarakat Jepang tradisional sejak lama telah berada dalam kerangka sosial yang tersorganisir dan kolektif, bukan sekedar pilihan personal. Namun ketika akhirnya sistem ini mulai runtuh karena modernisasi, ia tidak bisa digantikan dengan alternatif lain hingga kemudian menyisakan kekosongan institusional yang membuat individu semakin bergantung pada inisiatif personal dalam mencari pasangan ditengah kondisi sosial yang tidak lagi mendukungnya, dimana pencarian pasangan sangat bergantung pada inisiatif personal, tetapi tidak diimbangi dengan lingkungan sosial yang suportif. Bersamaan dengan itu, munculnya ideologi *salaryman* atau ideologi yang mengkonstruksi maskulinitas Jepang yang menempatkan laki-laki sebagai pekerja kantoran yang harus berdedikasi tinggi dengan mengorbankan waktu pribadi demi karier dan memberikan nafkan penuh bagi keluarga secara langsung menciptakan standar kelelahan yang sangat spesifik sebagai prasyarat menikah (Kuokkanen, 2025, p. 7). Hal ini kemudian memunculkan bentuk *hegemonic masculinity* yang diposisikan sebagai standar ideal untuk laki-laki Jepang modern, meskipun dalam praktiknya tidak seluruh laki-laki pada akhirnya mampu untuk memenuhi standar tersebut karena standar ini berinteraksi secara destruktif dengan kapitalisme pasca *bubble economy* yang justru tidak lagi mampu menyediakan kondisi kerja yang memungkinkan pemenuhan standar tersebut.

Pengaruh dimensi gender juga memberikan dampak yang sangat besar pada fenomena *mikonka* di Jepang. feminisasi pendidikan di Jepang dalam bentuk dimana perempuan Jepang saat ini semakin banyak yang mengakses pendidikan tinggi dan memasuki dunia kerja profesional yang menciptakan tantangan baru dalam konteks budaya Jepang yang masih mempertahankan ekspektasi tradisional bahwasanya istri bertanggung jawab atas urusan domestik. Perempuan Jepang yang berpendidikan tinggi dan mapan secara ekonomi kemudian dihadapkan dengan paradoks bahwa semakin tinggi pencapaian akademis dan profesional mereka maka pilihan untuk memilih pasangan yang dianggap memenuhi standar hipergami sosial yang tertanam dalam budaya Jepang menjadi semakin sulit (Agusriyani et al., 2025, pp. 1742–1743). Di sisi lain, budaya *shame* atau rasa malu yang mengakar kuat pada masyarakat Jepang turut berkontribusi dengan cara yang kompleks, tekanan sosial untuk tidak terlihat gagal secara ekonomi membuat laki-laki muda yang terjebak dalam prekarisasi kerja cenderung menghindari pernikahan bukan karena mereka tidak ingin, melainkan karena pilihan untuk menikah dalam kondisi tidak mapan hanya akan dianggap memalukan secara sosial. Faktor lain yang juga relevan dan saling tumpang tindih dengan *mikonka* adalah fenomena *hikikomori* atau penarikan diri dari lingkungan sosial dengan cara yang sangat ekstrem, hal ini kemudian menunjukkan bahwa bagi sebagian individu *mikonka* bukan hanya sekedar keputusan rasional-ekonomis tetapi juga merupakan konsekuensi dari isolasi sosial yang lebih dalam yang lahir dari tekanan budaya dan struktural yang tidak tertangani. Seluruh faktor-faktor ini yakni *ie* system, patriarki, *omiai*, ideologi *salaryman*, *shame culture*, transformasi maskulinitas, feminisasi pendidikan, dan *hikikomori* kemudian berinteraksi dengan kapitalisme sebagai faktor pendukung yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi yang menentukan mengapa *mikonka* di Jepang memiliki karakter dan intensitas yang berbeda dari negara kapitalis manapun di dunia.

Di sinilah perspektif *human security* menjadi relevan dan krusial sebagai lensa analisis. Ancaman terhadap keamanan manusia dalam dunia dewasa ini tidak lagi hanya berwujud konflik bersenjata, agresi militer, atau bencana alam semata, konsep *human security* secara fundamental juga bisa dikatakan sebagai bagaimana melindungi kesejahteraan individu, meliputi ancaman fisik ataupun psikologis, hingga dimensi sosial (Malik & Gul, 2024, p. 197). Dalam konteks masyarakat Jepang, kapitalisme modern melalui prekarisasi kerja, proses individualisasi yang menguat, dan komodifikasi kebutuhan relasional yang kemudian menciptakan bentuk-bentuk ketidakamanan baru yang tidak bersifat langsung dan eksplosif, melainkan bekerja secara peralihan, mengikis fondasi kehidupan sosial individu dari dalam. Ancaman ini disebut sebagai *slow violence*. Menurut (Davies, 2022, pp. 409–427) adalah kekerasan yang hadir secara tidak langsung namun secara perlahan menghancurkan kemampuan individu untuk hidup secara bermartabat, stabil, dan memiliki hubungan sosial yang bermakna, sehingga *slow violence* ini memaksa kita untuk melihat lebih luas tentang apa yang kita anggap sebagai bahaya, menuntun

untuk menganggapi bentuk serius dari bentuk-bentuk kekerasan yang seiring waktu berubah terlepas dari apapun penyebab aslinya. Dalam konteks *mikonka*, kondisi ini menciptakan paradoks dimana Jepang sebagai negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi dan teknologi yang maju justru mengalami kerentanan sosial dan psikologis yang semakin dalam. Kemajuan ekonomi nasional dengan ini tidak selalu berarti berbanding lurus dengan peningkatan keamanan manusia di level individual. Hal inilah yang membuat *human security* menjadi kerangka analisis yang paling bisa membaca fenomena *mikonka*.

Penelitian ini akan mengkaji fenomena *mikonka* yang terjadi di Jepang dengan melihat dari pandangan *human security* dengan cara memposisikan kapitalisme sebagai *enabling structure*, yakni struktur yang menimbulkan kondisi-kondisi di mana *mikonka* menjadi lebih rasional dan lebih mungkin diterima secara sosial, tetapi kapitalisme bukan menjadi faktor independen yang menyebabkan *mikonka*, hanya memicu untuk rantai fenomena lainnya bermunculan. Kapitalisme bekerja bukan dengan cara melarang pernikahan, melainkan dengan merekonstruksi kondisi kerja menciptakan prekarisasi ekonomi, memperluas individualisasi, dan mengkomodifikasi kebutuhan relasional yang sebelumnya hanya dapat dipenuhi melalui mekanisme institusi pernikahan. Selain untuk mencoba membaca kondisi sosial masyarakat Jepang saat ini, penelitian ini juga akan mencoba memproyeksikan implikasi jangka panjang yang timbul dari fenomena *mikonka* ini terhadap keberlanjutan relasi sosial, stabilisasi demografi, serta bagaimana kondisi *human security* masyarakat Jepang terpengaruh. Penelitian ini bersifat penting sebab *mikonka* tidak hanya dapat dipahami sebagai pilihan hidup semata, seringkali penilitan yang membahas *mikonka* cenderung melalui perspektif sosiologi demografi yang melihatnya sebagai persoalan kultural atau hanya sebagai pilihan hidup saja, namun tidak melihat dan mengkaji secara lebih kritis bagaimana kapitalisme berinteraksi dengan faktor-faktor penyebab yang lain, mencakup faktor sosial-budaya dimana perubahan norma gender, individualisasi, dan komodifikasi relasi sosial turut berperan dalam membentuk kondisi struktural yang menjadi faktor latar belakang fenomena tersebut. Di lain sisi, kajian mengenai *human security* di Asia Timur lebih banyak mengarah kepada isu-isu konvensional seperti ancaman pangan dan juga bencana alam yang akhirnya berindikasi pada kerentanan sosial yang lahir dari transformasi relasi sosial yang disebabkan oleh munculnya kapitalisme yang belum mendapat perhatian penuh.

Ada hal yang perlu menjadi perhatian mengapa kemudian menyebabkan *mikonka* tumbuh subur di Jepang. Jika melihat dari kondisi sosial ekonomi yang terjadi di Jepang, yang di mana Jepang membangun kembali ekonominya dengan ideologi kapitalisme industrial yang dilakukan setelah perang dunia II, di mana kemudian melahirkan karakter masyarakat Jepang yang mempunyai etos kerja yang tinggi sebagai kepribadian sosial yang baik. Namun akibat dari etos kerja yang tinggi ini timbul masalah baru yakni fenomena *karoshi*, yakni kematian akibat kelelahan kerja berlebih. Hal ini menjadi bukti betapa mengerikannya kapitalisme mempengaruhi Jepang hingga pada taraf individu (Rios, 2021, p. 36). Ketika terjadi fenomena runtuhnya gelembung ekonomi (*bubble economy*) di Jepang pada tahun 1990-an, situasi dimana Jepang mengalami krisis ekonomi dalam tingkatan yang sangat ekstrim hingga kemudian menyebabkan banyak generasi muda di era tersebut mengalami tantangan baru, ekonomi jatuh kedalam kondisi yang sangat lesu sebagai akibat dari perusahaan yang menolak untuk berinvestasi, konsumen yang enggan membelanjakan uangnya, hingga semua solusi ekonomi standar yang diupayakan oleh pemerintah gagal memperbaiki situasi (Japan Society, 2023, p. 1). Untuk merespon kondisi pelemahan ekonomi ini, perusahaan-perusahaan di Jepang mulai menyesuaikan sistem manajemen tradisional mereka, yakni salah satunya adalah meninggalkan sistem *shuushin koyou* atau sistem ketenagakerjaan seumur hidup (Sulastari & Damayanti, 2022, pp. 202–215). Dimana *shuushin koyou* menjadi kontrak sosial implisit yang menopang stabilitas ekonomi kelas menengah Jepang sekaligus menjadi fundamen di mana kepercayaan diri atas pernikahan dan pembentukan keluarga itu dapat dilakukan. Namun alih-alih mendapatkan pekerjaan tetap seumur hidup dan gaji yang mumpuni, mereka malah mendapatkan sistem kerja nonreguler yang tidak stabil. Hingga para pekerja harus terpaksa berpindah pindah dari satu tempat kerja ke tempat kerja yang lain, generasi ini kemudian disebut sebagai *freeter* (Yukie, 2023, pp. 51–53). Ketidakstabilan kondisi ini kemudian menyebabkan perubahan terhadap

kalkulasi seseorang untuk memilih tidak menikah dan berkeluarga, bukan karena mereka tidak menginginkan pernikahan, tetapi karena pernikahan dalam konteks kapitalisme kontemporer Jepang telah bergeser maknanya menjadi sebuah proyek ekonomi dengan tingkat risiko yang sangat tinggi karena diperlukan fondasi yang kuat seperti kestabilan ekonomi yang hal tersebut sulit dicapai oleh para pekerja muda Jepang pada era tersebut.

Yang membuat kemudian fenomena ini menjadi semakin kompleks adalah karena kapitalisme tidak hanya menciptakan hambatan terhadap pernikahan, tetapi juga secara aktif menyediakan alternatif-alternatif non-pernikahan melalui mekanisme pasar, dimulai dari berkembangnya industri substitusi relasi sosial seperti *host* dan *hostess club*, *maid cafes*, layanan *companion* berbayar, hingga *virtual companionship* berbasis *artificial intelligence*. Argumen mengenai komodifikasi intimasi ini meskipun secara teoritis memang kuat dan meyakinkan, tetap membutuhkan landasan data empiris yang akan diuraikan secara lebih mendalam pada bagian pembahasan termasuk data penggunaan layanan tersebut, studi tentang komodifikasi intimasi di Jepang, serta penelitian tentang bagaimana industri-industri ini secara konkret mengubah pandangan dan pemikiran individu terhadap kebutuhan relasional. Untuk itu perlu diingatkan juga bahwa seluruh dinamika ini berinteraksi dengan kondisi *human security* individu di Jepang dengan cara yang tidak langsung nampak melainkan berjalan secara perlahan dan kumulatif, sebuah bentuk *slow violence* terhadap keamanan manusia yang tidak menghadirkan kekerasan fisik secara langsung, namun perlahan-lahan merusak dan mengancam kehidupan sosial individu melalui prekarisasi kerja, ketidakamanan pekerjaan, melemahnya jaringan pengamanan sosial, kerentanan dalam kehidupan personal dan ekonomi, hingga pelemahan institusi komunitas (Koji, 2023).

Perspektif *human security* kemudian menjadi sangat-sangat relevan untuk menjadi kerangka analisis utama dalam penelitian ini. Ancaman keamanan manusia modern tidak lagi dapat dipahami hanya semata konflik bersenjata atau agresi militer, melainkan juga mencakup transformasi ekonomi-politik, perubahan relasi sosial, atomisasi individu, dan melemahnya institusi komunitas yang secara bersama dapat mengikis kemampuan individu untuk hidup secara bermartabat, stabil, dan memiliki relasi sosial yang memadai. Dalam konteks ini, *human security* pada dasarnya adalah bagaimana memberikan perlindungan terhadap kesejahteraan individu dalam dimensi fisik, psikologis, dan sosial, sehingga berbagai bentuk kerentanan sosial juga dapat dipahami sebagai ancaman terhadap keamanan manusia (Malik & Gul, 2024, p. 197). Sehingga *mikonka* kemudian dapat dilihat bukan hanya sebagai penurunan angka pernikahan semata, melainkan adalah cerminan hasil dari bagaimana individu Jepang mengalami kondisi keamanan yang semakin melemah dalam kehidupannya sehari-hari. Bukankah hal ini menimbulkan sebuah paradoks? Negara besar dengan kemajuan ekonomi nasional yang sangat tinggi mempunyai ancaman masalah keamanan dalam menjaga warga negaranya? Apalagi ketika kemajuan tersebut dibangun diatas fondasi kapitalisme yang secara sistemik mengikis institusi-institusi sosial yang selama ini menjadi penyangga? Paradoks inilah yang kemudian menjadi dasar pemikiran analisis penelitian ini, menjadikan *human security* sebagai lensa yang tidak dapat disubstitusikan oleh pendekatan keamanan lainnya.

METODE PENELITIAN

Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan desain penelitian **deskriptif-analitis**. Penulis memilih pendekatan ini dengan alasan penelitian ini bukan untuk mengukur banyaknya besaran hubungan antarvariabel secara statistik, tetapi untuk melihat dan membaca kapitalisme sebagai *enabling structure* berinteraksi dengan faktor-faktor lainnya seperti faktor sosial, budaya, dan institusional dalam membentuk fenomena *mikonka* serta implikasinya terhadap kondisi *human security* di Jepang. Pendekatan kualitatif ini diambil karena memungkinkan penulis untuk menangkap kompleksitas hubungan antara struktur sosial, perubahan ekonomi politik, dan tindakan individu tanpa mereduksinya ke dalam indikator kuantitatif saja karena keduanya memiliki hubungan yang tidak bisa disederhanakan ke dalam angka semata serta mencegah menghilangkan kedalaman analisisnya (David Creswell & William Creswell, 2023, p. 46)

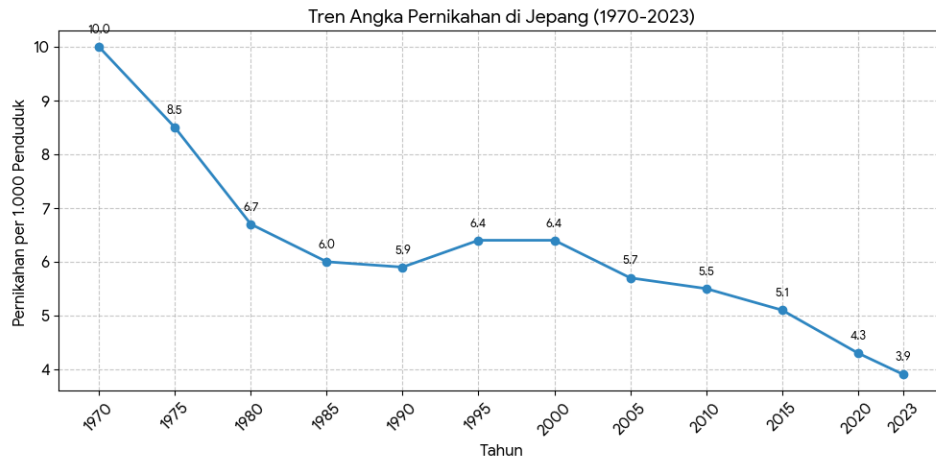
Penelitian ini **bersifat studi kasus tunggal** (*single case study*) dengan Jepang sebagai analisis utamanya. Penulis memilih Jepang bukan tanpa alasan, sebab Jepang adalah salah satu negara yang mengalami penurunan angka pernikahan secara signifikan bersamaan dengan meningkatnya prekarisasi kerja, perubahan norma gender, individualisasi, dan penuaan populasi. Menjadikan Jepang sebagai laboratorium nyata yang ideal untuk menguji kerangka analisis yang ditawarkan dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi fokus analisis penelitian ini adalah fenomena *mikonka* sebagai gejala sosial dalam masyarakat Jepang kontemporer dengan rentang periode analisis sejak dekade 1990 hingga awal 2020-an. Periode ini dipilih karena mencakup fase setelah runtuhnya *bubble economy* yang ditandai dengan restrukturisasi pasar kerja, meningkatnya ketidakpastian ekonomi, serta berbagai perubahan sosial yang berpengaruh pada pola relasi interpersonal dan institusi keluarga di Jepang.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini akan mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari sumber kredibel, misalnya dokumen-dokumen resmi, jurnal akademik, laporan lembaga internasional, buku-buku penunjang pembahasan, serta publikasi statistik yang dapat dipertanggungjawabkan dan kredibel. Data-data yang kemudian akan ditampilkan dari berbagai sumber tidak akan digunakan sebagai temuan kuantitatif yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bahan ilustrasi observasi yang berfungsi sebagai penegasan dari argumen-argumen kualitatif yang telah dibangun dalam penelitian ini. Dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai skala kejadian mengenai topik yang sedang dikaji kepada pembaca.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis dokumen (*document analysis*) yang dikombinasikan dengan pandangan teoritis berbasis *human security*. Proses analisis dilakukan dengan 3 tahap. Pertama, mengidentifikasi dan memetakan data-data yang relevan dengan fenomena *mikonka*, perubahan struktur ketenagakerjaan, norma gender, individualisasi, serta faktor lainnya yang relevan dengan konteks Jepang kontemporer. Kedua, data tersebut diinterpretasi menggunakan konsep *enabling structure* dan teori strukturasi Anthony Giddens untuk memahami bagaimana kondisi struktural berinteraksi dengan tindakan individu dalam membentuk perubahan relasi sosial. Ketiga, data data tersebut kemudian dikaji melalui perspektif *human security* khususnya pada dimensi *economic security*, *personal security*, dan *community security* untuk menjelaskan bagaimana transformasi relasi sosial yang menyertai fenomena *mikonka* ini berkontribusi terhadap munculnya berbagai bentuk kerentanan dalam masyarakat Jepang.

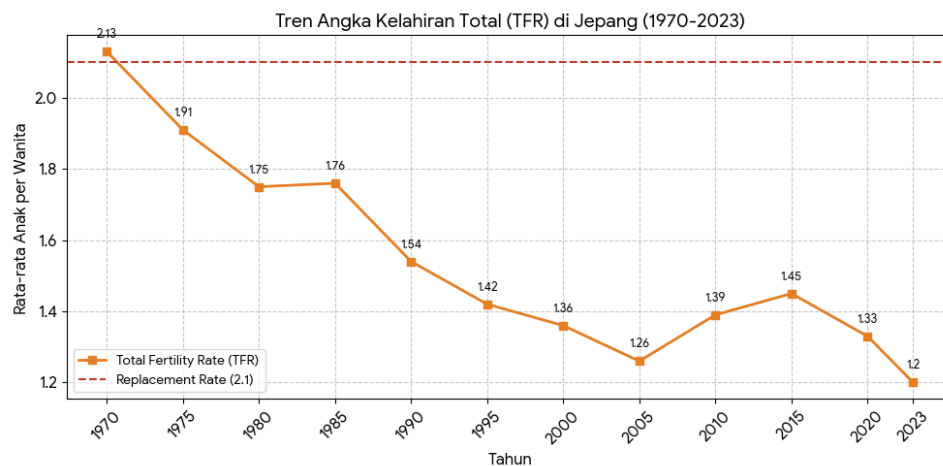
HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini akan menganalisis fenomena *mikonka* di Jepang melalui perspektif *human security* sebagai kerangka analitis yang aktif untuk membedah fenomena ini. Pembahasan akan diorganisir untuk menjawab lima pertanyaan penelitian secara sistematis, yaitu bagaimana kapitalisme sebagai *enabling structure* mereproduksi *mikonka*, mengapa transformasi kapitalisme berimplikasi pada ancaman *human security*, bagaimana kapitalisme mengubah makna pernikahan bagi masyarakat Jepang kontemporer, mengapa sebagian individu tetap memilih menikah dalam struktur yang sama, dan apakah negara masih dapat menjamin *human security* ketika institusi keluarga mengalami transformasi fundamental. Sebelum memasuki analisis lebih dalam mengenai *mikonka* dan dampak yang dihasilkan oleh fenomena ini, penulis hendak menetapkan sebuah titik tolak empiris. Yakni *mikonka* bukan hanya dianggap sebagai tren sosial yang dapat diukur kedalam satuan angka semata, tetapi juga dilihat sebagai ancaman serius yang mengancam keamanan individu di Jepang. Pasalnya, angka pernikahan di Jepang mengalami penurunan yang sangat signifikan, angka pernikahan yang awalnya 10,0 per 1.000 penduduk pada tahun 1970 turun menjadi 3,9 pada tahun 2013. Sungguh angka yang sangat besar karena tingkat penurunannya mencapai lebih dari 60% dalam rentang setengah abad. Disisi lain, total *fertility rate* di Jepang telah lama berada jauh di bawah angka yang ditetapkan oleh dunia internasional yakni sebesar 2,1 (Ministry of Health, Labour, And Welfare Japan, 2024). Berikut adalah statistik yang menunjukkan tingkat penurunan pernikahan dan penurunan angka pernikahan di Jepang dalam jenjang periode tertentu.



Sumber: Vital Statistics of Japan (2024).

Gambar 1. Grafik Tren Angka Pernikahan di Jepang Tahun 1970-2023 (Diolah)



Sumber: Vital Statistics of Japan (2024).

Gambar 2. Grafik Tren Angka Kelahiran Total di Jepang Tahun 1970-2023 (Diolah)

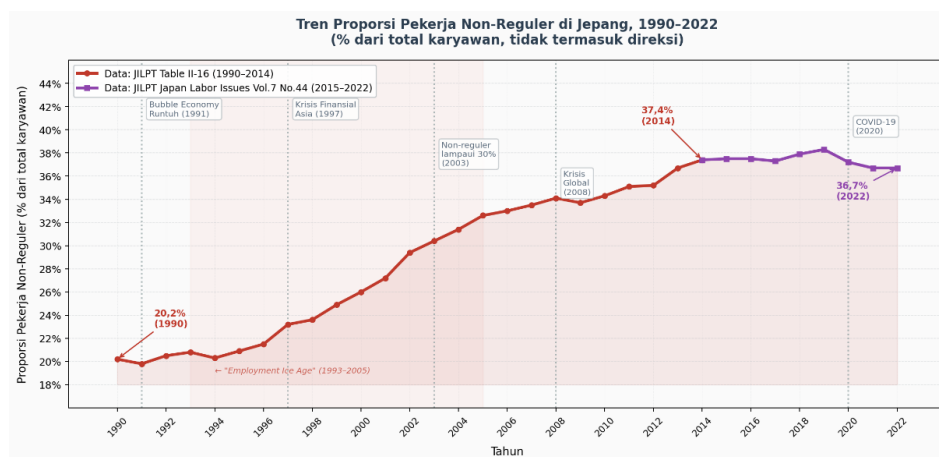
Angka-angka diatas telah menunjukkan bahwa krisis demografi di Jepang telah menjadi suatu permasalahan yang sangat serius. Penurunan angka pernikahan, rendahnya tingkat fertilitas, serta ketidakmampuan Jepang mempertahankan *replacement rate* dalam beberapa dekade terakhir ini pada akhirnya menunjukkan bahwa fenomena ini bukan lagi hanya fluktuasi sementara yang melanda Jepang, tetapi menunjukkan bahwa ada perubahan yang terjadi dalam struktural dalam masyarakat Jepang modern. Penulis juga berpendapat bahwa angka-angka tersebut tidak memerlukan elaborasi lebih lanjut dikarenakan skala penurunan tingkat pernikahan dan kelahiran sudah dengan jelas tercantum. Yang nantinya akan menjadi pembahasan dari penelitian ini adalah mengapa hal ini bisa terjadi, dan apa saja dampak yang ditimbulkan terhadap *human security* di Jepang.

Kapitalisme Sebagai *Enabling Structure* dalam Mereproduksi *Mikonka*.

Untuk pertanyaan pertama ini penulis akan berangkat dari level yang paling fundamental, bukan untuk mempertanyakan apakah orang Jepang masih menginginkan pernikahan, tetapi tentang bagaimana kondisi struktural yang diciptakan oleh kapitalisme mengubah cara berpikir individu di Jepang tentang pernikahan untuk diambil sebagai keputusan yang strategis. Penulis berpendapat bahwa kapitalisme melalui meningkatnya ketidakpastian kerja secara intens pasca runtuhnya *bubble economy* pada akhirnya menggeser pernikahan dari sesuatu yang secara sosial dianggap sebagai tahapan alamiah kehidupan yang wajar diambil oleh manusia berubah menjadi sebuah proyek ekonomi yang membutuhkan kalkulasi risiko yang matang sebelum diambil.

Untuk menjawabnya, analisis ini akan berangkat dari kerangka *critical political economy* yang memandang kapitalisme bukan hanya sekedar sistem produksi dan distribusi ekonomi saja, melainkan juga dapat diartikan sebagai suatu tatanan sosial yang turut membentuk hubungan antara negara, pasar, dan masyarakat, sekaligus menentukan kondisi struktural tempat individu membuat keputusan-keputusan penting dalam hidupnya (Streeck, 2025, p. 410). Dalam kerangka ini, pilihan untuk menikah tidak hanya dipahami sebagai hasil dari preferensi individual dan gaya hidup semata, melainkan sebagai respons terhadap peluang, batasan, dan risiko yang dihasilkan oleh struktur ekonomi yg lebih luas.

Pergeseran ini terjadi bukan tanpa alasan, hal yang perlu dipahami adalah bagaimana struktur pasar kerja di Jepang bertransformasi secara drastis sejak awal tahun 1990an. Dimulai dengan runtuhnya *bubble economy* pada 1991, kejadian ini bukan hanya sekedar krisis finansial siklus biasa, ia menandai berakhirnya sebuah kontrak sosial yang telah ditetapkan oleh Jepang secara implisit sebab munculnya kapitalisme yang bernama *shuushin koyou* dan pada akhirnya berimbas pada keadaan tenaga kerja di Jepang. *Shuushin koyou* adalah sistem ketenagakerjaan Jepang yang bersifat seumur hidup. Artinya, ketika seseorang telah terikat kontrak pada sebuah perusahaan, maka selama karyawan tersebut bekerja keras dan memberikan kesetiannya kepada perusahaan, maka perusahaan wajib hukumnya membalas dengan cara menjamin karier yang panjang, mendapatkan tunjangan keluarga dari perusahaan, dan pada akhirnya mendapatkan pensiun yang layak. Kontrak inilah yang menjaga keseimbangan di Jepang antara ekonomi dan hubungannya dengan pernikahan dan pembentukan keluarga. Karena ketika ekonomi terjaga, kepercayaan diri seorang individu untuk membentuk keluarga cenderung lebih tinggi. (Genda, 2007, pp. 25, 27, 39) Namun ketika kontrak tersebut runtuh dan akhirnya digantikan oleh ekspansi masif tenaga kerja non-reguler, dalam hal ini mencakup pekerja paruh waktu, pekerja kontrak, dan *freeters* yang berpindah-pindah profesi dan tempat pekerjaan dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa mendapatkan kepastian apapun, fondasi ekonomi pun runtuh bersamaan dengan runtuhnya kontrak yang bersifat menjamin tersebut. Sehingga pada akhirnya menciptakan keraguan bagi para individu untuk menjalin pernikahan dan membangun keluarga akibat kondisi ekonomi mereka yang belum sepenuhnya terjamin. Berikut adalah data yang akan menunjukkan tingkat pekerja non-reguler di Jepang.



Sumber: Japan Institute for Labour Policy and Training (JILPT) dan Japan's Employment System and Public Policy

Gambar 3. Grafik Proporsi Kerja Non-Reguler Jepang 1990-2022 (Diolah)

Namun prekarisasi ekonomi bukanlah masalah utamanya, ia hanya salah satu lapisan dari persoalan yang lebih kompleks. Hal yang menyebabkan dampak kapitalisme terhadap rasionalitas pernikahan menjadi lebih dalam adalah bahwa ia tidak hanya melemahkan kemampuan ekonomi individu, tetapi secara bersamaan juga meninggikan standar material yang dipersyaratkan oleh individu untuk mencapai tahap siap untuk menikah, hal ini dapat dilihat melalui adanya peningkatan biaya hidup perkotaan, tingginya ekspektasi terhadap kualitas

hunian, dan biaya pendidikan anak yang jadi salah satu biaya tertinggi di dunia. Akhirnya menciptakan kondisi di mana individu belum memiliki kekuatan ekonomi yang stabil juga dihadapkan dengan ambang batas kesiapan menikah yang semakin sulit untuk diraih dan dijangkau. Dalam kondisi ini, keputusan untuk menunda pernikahan bukan lagi sekedar pilihan hidup semata, tetapi ia menjelma menjadi respon yang secara ekonomi menjadi hal yang paling masuk akal terhadap kondisi struktural yang tidak memberikan kepastian.

Dari sinilah peran kapitalisme sebagai *enabling structure* kemudian menjadi semakin jelas terlihat. Kapitalisme tidak secara langsung melarang siapapun untuk menikah, ia hanya mengubah kondisi di mana keputusan itu dibuat sedemikian rupa sehingga penundaan atau penghindaran pernikahan menjadi pilihan yang secara rasional bersifat lebih defensif dan lebih dapat dipertahankan. Ketika seorang laki-laki muda dengan kontrak kerja non-reguler yang tidak stabil menolak pernikahan, hal tersebut terjadi bukan karena ia tidak menginginkannya tetapi ia menundanya karena dalam kondisi struktural yang diciptakan kapitalisme, mengambil keputusan untuk berkomitmen finansial jangka panjang seperti melakukan pernikahan dalam keadaan ekonomi yang rapuh terasa seperti mengambil risiko yang tidak perlu. Pernikahan dalam logika kapitalisme kontemporer Jepang telah mengalami pergeseran makna, di mana pernikahan dari institusi sosial yang secara normatif dijalani sebagai bagian dari kebiasaan hidup manusia pada normalnya menjadi sebuah proyek ekonomi jangka panjang yang membutuhkan fondasi yang kokoh sebelum dapat dijalankan, namun kondisi tersebut sulit terpenuhi karena ia berusaha untuk tumbuh dan tercukupi ditengah sistem yang tidak lagi menjamin stabilitas bagi sebagian besar tenaga kerjanya.

Kapitalisme sebagai *enabling structure* dalam konteks ini bekerja pada empat level secara simultan. Di level material, peningkatan proporsi pekerja non-reguler dari 20,2% pada tahun 1990 menjadi 36,7% pada tahun 2022 yang dapat dilihat pada tabel yang diolah dari (Japan Institute for Labour Policy and Training, 2016, p. 44; Koji, 2023, p. 53,55) menunjukkan kondisi di mana proporsi populasi usia produktif yang tidak memiliki fondasi ekonomi yang dianggap memadai untuk menikah menjadi semakin besar tiap tahunnya. Pada level normatif, ideologi *salaryman* yang menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama dengan karier tetap sebagai prasyarat maskulinitas dan kelayakan menikah tidak berjalan sama lurus dengan perubahan realitas pasar kerja, yang kemudian menghasilkan ketegangan antara standar yang tidak berubah dengan kondisi yang telah berubah drastis (Kuokkanen, 2025, p. 7). Pada level ideologis, budaya kompetisi dan orientasi produktivitas yang ditanamkan oleh kapitalisme secara perlahan mengikis logika relasional yang selama ini mendorong investasi dalam komitmen jangka panjang. Lalu pada level institusional kapitalisme kemudian membentuk sistem kesejahteraan yang dirancang dengan asumsi keluarga konvensional sebagai unit dasar yang secara struktural melemahkan posisi individu yang hidup di luar skema ini. Keempat level ini kemudian berinteraksi dan menjadikan *mikonka* bukan hanya sebagai pilihan gaya hidup seorang saja, tetapi ia adalah bentuk respons rasional terhadap kondisi struktural yang dibentuk dan direproduksi oleh kapitalisme. Hal ini disebut sebagai *reflexive monitoring* dalam bukunya (Giddens, 1984, p. 5)

Transformasi Kapitalisme dan Ancaman *Human Security*

Pertanyaan kedua bergerak dari penjelasan tentang mekanisme *mikonka* menuju analisis tentang mengapa mekanisme ini berimplikasi pada ancaman *human security*, Pertanyaan ini kemudian akan dianalisis dengan kerangka *human security* emansipatoris. Sebab ia memperlihatkan bahwa apa yang tampak sebagai perubahan gaya hidup pribadi ternyata bisa jadi berarti lebih besar, seperti manifestasi dari pelemahan sistemik terhadap kondisi yang memungkinkan manusia hidup secara bermartabat, aman, dan saling terhubung satu sama lain. Pendekatan *human security* melihat bahwa ancaman bukan hanya yang berwujud eksplisit dan langsung, boleh jadi ancaman itu datang dalam bentuk halus, tersebar secara perlahan, tidak terlihat, dan bersifat kumulatif atau menurut (Davies, 2022, pp. 409–427) adalah *slow violence*. *Mikonka* adlah wujud *slow violence* terhadap *human security* yang paling sulit dikenali justru karena ia tidak memperlihatkan kekerasan fisik secara nyata dan langsung, bahkan bisa dilihat

sebagai bentuk kebebasan berekspresi individu, jika melihat dari kerangka *human security* emansipatoris hal ini justru menjadi ancaman berbahaya, sebab ia bekerja dengan menghilangkan fondasi kehidupan sosial individu dari dalam secara gradual dan tanpa kebisingan, hingga pada titik di mana kerusakan kumulatifnya tidak lagi dapat diperbaiki dan diintervensi

Ancaman ini bekerja melalui tiga dimensi yang saling memperkuat. Dalam dimensi *economic security*, merujuk pada konteks ini diperluas melampaui kemiskinan absolut untuk mencakup ketidakpastian hidup jangka panjang (*living insecurity*). Mengutip dari (Park, 2021, pp. 979–992) ia mengatakan bahwa negara di Asia Timur mengalami paradoks krisis relasional dimana individu yang hidup di negara ini dapat bekerja, dan hidup di kota besar tetapi tidak memiliki kepastian atas masa depan yang cukup stabil guna mempertimbangkan untuk berkomitmen jangka panjang. Ancaman insekuritas ekonomi ini bukan dilihat melalui indikator PDB ataupun kemiskinan konvensional, ia adalah ancaman yang lahir dari lensa *human security* dalam melihat bagaimana individu menjalani hidupnya sehari-hari. Dan ironinya, kemajuan industrial Jepang tidak dapat menghentikan paradoks ini, malah dalam banyak hal justru ikut mereproduksinya.

Dalam dimensi *personal security*, ancaman yang paling nyata terlihat dari fenomena *kodokushi* atau kematian sendirian yang tidak diketahui dalam waktu yang lama. Berdasarkan laporan dari Badan Kepolisian Nasional Jepang, ditemukan hampir 22.000 orang di Jepang yang meninggal dunia di rumah dalam kurun waktu 3 bulan pertama tahun 2024, dengan sekitar 80% di antaranya berusia 65 tahun keatas. Hingga akhir tahun, diperkirakan akan sampai pada angka 68.000 (MCcurry, 2024). Dalam kerangka *human security*, *kodokushi* bukan sekedar tragedi personal, ia adalah indikator sistemik dari masyarakat yang mengalami atomisasi sosial yakni kondisi dimana individu hidup semakin terisolasi, tidak memiliki jaringan keterhubungan yang bermakna, dan pada akhirnya meninggal dunia tanpa diketahui orang lain. Hal ini sejalan dengan *liquid modernity*, yang mana menurut Bauman, pp. (2012, pp. 13–14) ialah ikatan sosial menjadi semakin cair, mudah terbangun namun mudah juga untuk terputus, hal ini juga menyebabkan komitmen dianggap sebagai beban yang membatasi kebebasan individu. Hingga pada akhirnya fenomena *kodokushi* ini merupakan hal menjadi ironi dari ujung atomisasi yang telah terjadi selama puluhan tahun.

Dalam konteks *community security*, ancaman beroperasi pada level yang lebih kolektif namun tidak kalah serius. Kapitalisme mendorong masyarakat menuju gaya hidup yang mengedepankan individualisme, kompetisi, dan orientasi yang mengacu pada produktivitas personal, sehingga identitas individu itu bergeser maknanya dari yang awalnya ditentukan oleh keterlibatan dalam komunitas mengerucut menjadi ditentukan oleh performa ekonomi dan pencapaian karier. Proses inilah yang disebut sebagai atomisasi, proses pelemahan ikatan sosial yang membuat individu semakin bergantung pada dirinya sendiri dan semakin jauh dari jaringan interdependensi yang selama ini berfungsi sebagai mekanisme perlindungan kolektif terhadap ancaman krisis ekonomi, psikologis, dan eksistensial individu. Fenomena ini juga berimplikasi pada geopolitik dan sosial jangka panjang terhadap keberlanjutan Jepang sebagai negara maju. Terjadinya penurunan angka pernikahan dan fertilitas bukan hanya persoalan demografis, tetapi juga menyangkut kapasitas negara dalam mempertahankan sistem kesejahteraan di masa depan. Ketika populasi lansia meningkat sementara populasi produktif menurun, negara akan menghadapi tekanan besar terhadap sistem pensiun, layanan kesehatan, hingga perawatan lansia, dan akan berkembang menjadi isu keamanan manusia nasional di masa yang akan datang.

Dalam Kondisi Apa Tekanan Struktural Cukup Kuat untuk Menggeser Norma Sosial secara Kolektif?

Untuk pertanyaan ketiga penulis akan mencoba melihat dari kerangka *sociology of intimacy* yang menelusuri bagaimana kapitalisme mempengaruhi cara individu membangun, mempertahankan, dan memaknai dimensi paling fundamental bagi manusia, yaitu hubungan

intim. Dalam kerangka tersebut, konsep *pure relationship* yang diperkenalkan oleh Anthony Giddens menggambarkan hubungan yang dipertahankan bukan sebab kewajiban sosial, tradisi, atau kebutuhan ekonomi, melainkan semata-mata karena ia memberikan kepuasan intrinsik kepada kedua pihak yang terlibat, dan dapat diakhiri kapan saja ketika kepuasan itu tidak lagi dirasakan. Transformasi menuju *pure relationship* ini meskipun secara normatif tampak sebagai kemajuan, hubungan menjadi lebih setara, lebih bebas, dan lebih autentik, tetapi ia tetap memproduksi kondisi di mana komitmen jangka panjang seperti pernikahan menjadi semakin sulit untuk dipertahankan, karena kapitalisme terus menciptakan kondisi dimana pernikahan dapat dipertanyakan ulang secara terus menerus. Dalam konteks Jepang, kondisi struktural kapitalisme dalam bentuk prekarisasi kerja, individualisasi risiko, dan orientasi produktivitas kemudian berinteraksi dengan pernikahan yang semakin instrumental dan berbasis resiko.

Argumen yang coba dibangun adalah bahwa pergeseran norma sosial terjadi ketika kapitalisme tidak hanya menciptakan hambatan terhadap institusi yang menjadi sumber norma tersebut, tetapi juga sekaligus menyediakan alternatif-alternatif fungsional yang mampu memenuhi kebutuhan yang sebelumnya hanya dapat dipenuhi oleh institusi tersebut, dalam hal ini adalah pernikahan. Selama pernikahan pernikahan tetap menjadi satu-satunya institusi yang menyediakan sumber pemenuhan kebutuhan sosial-emosional manusia, kedekatan afektif, keamanan relasional, identitas sosial, dan jaringan dukungan jangka panjang maka norma sosial disekitarnya akan tetap bertahan bahkan jika tekanan ekonomi menekannya sekalipun. Individu akan tetap berusaha untuk menikah karena tidak ada alternatif yang dianggap dapat menggantikan fungsi-fungsi tersebut. Namun apabila kapitalisme mulai mengkomodifikasi setiap komponen kebutuhan manusia menjadi dapat dirasakan secara terpisah dan sendiri-sendiri, maka pernikahan perlahan akan kehilangan posisi eksklusifnya sebagai sumber pemenuhan kebutuhan emosional dan sosial.

Salah satu bentuk berkembangnya industri substitusi relasi sosial di Jepang bisa dilihat sebagai manifestasi atau bentuk realisasi paling konkrit dari mekanisme diatas. Dengan tumbuh suburnya *host* dan *hostess clubs* yang menyediakan perhatian personal dan koneksi emosional dalam format yang dapat dibeli ketika dibutuhkan. Industri hiburan dewasa menyediakan *maid cafe* dan layanan *copanion* berbayar sebagai pemenuhan kebutuhan seksual tanpa komitmen relasional dalam lingkungan yang relatif bisa diawasi dan dikontrol. Bahkan menurut Kazuhisa Arakawa, munculnya *marketing* lain dalam bentuk *solo economy* yang menyediakan hiburan berupa *solo dining*, *solo travel*, *solo karaoke*, hingga layanan persiapan kematian sendiri yang diproyeksikan bisa mencapai angka 100 Triliun Yen (Shoji, 2025). Kemudian perkembangan teknologi ini memperluas komodifikasinya ke dimensi yang lebih personal. Dapat dilihat dengan munculnya *virtual companion* berbasis kecerdasan buatan yang semakin canggih secara bertahap menawarkan pengalaman relasional yang semakin menyerupai interaksi autentik, namun tanpa menghadirkan beban risiko, tuntutan, maupun komitmen yang umumnya bertaut pada hubungan interpersonal nyata, dilansir dari Grand View Research (2025) pendapatan yang dihasilkan dari *AI companion* ini telah meraup keuntungan hingga 2.167,6 juta USD pada tahun 2025 dengan indikator *AI companion* berbasis text merupakan pendapatan terbesar dan diprediksi bisa mencapai 14.641,0 juta USD pada tahun 2033 nanti, menunjukkan skala masif bagaimana individu di Jepang memiliki ketergantungan kepada *AI companion* ini. Pada akhirnya, kesan yang timbul adalah kapitalisme dalam proses ini tidak muncul sebagai penghancur norma sosial, tetapi sebagai penyedia solusi yang sangat efisien terhadap kebutuhan individu-individu yang ditinggalkan ketika norma sosial yang lama tidak lagi dapat dipenuhi secara konvensional

Hal yang kemudian perlu ditekankan adalah konteks *human security* adalah bahwa komodifikasi intimasi ini tidak netral secara sosial. Ia menghasilkan pergeseran yang tidak seimbang, di mana ia menyebabkan kebutuhan-kebutuhan jangka pendek terpenuhi dengan sangat amat efisien karena disediakan oleh pasar, sementara kebutuhan-kebutuhan jangka panjang yang membutuhkan inventasi relasional yang mendalam dan bersifat timbal balik seperti memberikan dukungan dalam krisis, pendampingan dalam penuaan, rasa ingin memiliki yang berakar dari komitmen pada akhirnya tidak memiliki dukungan pasar yang memadai. Pergeseran norma sosial yang dihasilkan oleh komodifikasi intimasi ini tidak sepenuhnya terbebas dari

konsekuensi yang akan menghampiri. Pergeseran ini menciptakan ilusi di permukaan bahwa masyarakat dapat terpenuhi kebutuhannya, namun secara struktural menjadi semakin rentan terhadap bentuk-bentuk ancaman *human security* yang baru akan terwujud dalam jangka panjang. Ketika keputusan untuk tidak menikah akhirnya tidak lagi mengandung stigma sosial yang signifikan karena pasar telah menyediakan penggantinya, ambang batas normatif yang sebelumnya memaksa dan mengatur individu untuk berinvestasi dalam relasi jangka panjang menjadi semakin kabur dan melemah. Yang pada akhirnya turut melemahkan mekanisme sosial terpenting yang selama ini membangun jaringan ketergantungan resiprokal yang menjadi fondasi utama aspek keamanan komunitas.

Mengapa Sebagian Tetap Memutuskan Untuk Menikah Sementara yang Lain Tidak dalam Struktur yang Sama?

Pertanyaan selanjutnya akan menjadi pertanyaan paling krusial secara epistemologis, karena ia akan menjadi bukti empiris paling gamblang bahwa kapitalisme adalah hanya sebagai *enabling structure* dan bukan sebagai determinan tunggal. Fakta bahwa tidak semua penduduk Jepang memilih *mikonka* meskipun mereka semua hidup di bawah tekanan kapitalisme yang sama, terpapar pada kondisi prekarisasi kerja yang sama, dan memiliki akses terhadap alternatif komodifikasi intimasi yang sama, bisa menjadi bukti bahwa ada sesuatu diluar struktur yang menentukan hasil akhirnya. Sesuatu tersebut bernama nilai personal, dan argumen yang dibangun adalah bahwa nilai personal tersebut tidak terbentuk secara independen dari struktur, melainkan dibentuk dari bagaimana individu mengalami dan menegosiasikan posisinya dalam struktur kapitalisme melalui proses sosialisasi yang berbeda-beda.

Individu-individu yang memilih menikah dalam kondisi struktural yang sama dengan mereka yang memilih *mikonka* sebenarnya dapat diidentifikasi bukan dari kondisi ekonomi mereka yang lebih baik, melainkan dari sistem nilai yang telah terbentuk dalam diri mereka masing-masing, nilai-nilai seperti apa yang membuat hidup bermakna dan apa yang dianggap sebagai kehidupan yang baik. Mereka hidup dan tumbuh dalam lingkungan keluarga dengan jaringan sosial yang kuat, di mana nilai-nilai relasional dan komitmen jangka panjang menjadi referensi identitas yang dominan, cenderung mempertahankan pernikahan sebagai komponen sentral dari definisi mereka tentang bagaimana menjalankan kehidupan dengan baik, bahkan ketika kondisi ekonomi mereka tidak ideal. Sehingga pada akhirnya terjadi pergeseran pemahaman dalam memaknai pernikahan, bukan lagi kalkulasi risiko-keuntungan yang dapat dikalkulasikan kembali secara rasional ketika kondisi telah berubah. Pernikahan telah menjadi bagian dari identitas sosial serta gambaran mengenai kehidupan yang mereka anggap ideal untuk dijalani. Karena itu, komitmen terhadap pernikahan tidak semerta-merta menghilang meskipun perubahan itu terjadi.

Namun sebaliknya, ketika individu tumbuh dalam lingkungan lebih mengedepankan pencapaian individual, mobilitas, dan kemandirian, maka nilai-nilai yang secara aktif telah dipromosikan oleh budaya kerja dan budaya konsumsi kapitalisme ini cenderung membawa pandangan nilai yang berbeda ketika dihadapkan dengan keputusan tentang pernikahan. Alasannya bukan karena individu ini ingin bersikap egois atau tidak mampu berkomitmen, tetapi karena dalam kerangka referensi nilai yang telah terbentuk dalam diri mereka, pernikahan akan dilihat melalui bentuk pertanyaan yang berbeda. Pertimbangannya bukan lagi berpusat pada apakah pernikahan merupakan kewajiban sosial yang wajib dilakukan oleh individu, melainkan pada sejauh mana institusi tersebut selaras dengan bentuk kehidupan yang ingin dijalani. Ketika pertanyaan ini diutarakan dalam kondisi struktural yang membuat pernikahan terasa seperti beban risiko yang besar, hingga menghindar dan menunda menjadi pilihan yang cenderung diambil oleh individu karena terlihat lebih strategis.

Yang akan dilihat dari penelitian ini adalah bagaimana pergeseran nilai dalam masyarakat Jepang tidak terjadi secara acak dan abstrak, melainkan berkorelasi secara sistematis dengan fase historis kapitalisme yang melatari masa tiap generasi. Generasi yang mengalami proses sosialisasi utama pada masa *bubble economy* tumbuh dengan situasi ketika kapitalisme di Jepang

masih menawarkan optimisme ekonomi, peluang mobilitas sosial, budaya konsumsi yang berkembang pesat, serta penerimaan yang semakin besar terhadap individualisme. Kondisi tersebut akhirnya mendorong mereka untuk menginternalisasi nilai-nilai individual yang lebih kuat dibandingkan dengan generasi selanjutnya. Sementara generasi yang tumbuh setelah runtuhnya *bubble economy* dibentuk oleh realitas yang berbeda. Ketidakstabilan kerja, ketidakpastian ekonomi, dan melemahnya jaminan sosial. Namun alih-alih kembali pada nilai-nilai relasional tradisional sebagai bentuk perlindungan sosial, generasi ini justru semakin menguatkan orientasi untuk mendalami individualisme sebagai strategi adaptikal terhadap kondisi yang di mana tidak menjamin apapun selain diri sendiri. Dengan begitu, kapitalisme tidak dipahami semata sebagai sistem ekonomi, melainkan juga sebagai kekuatan sosial yang turut membentuk orientasi nilai setiap generasi. Perbedaan pengalaman historis antar generasi inilah yang kemudian menghasilkan bentuk-bentuk individualisme yang berbeda, sekaligus menjelaskan mengapa penurunan minat untuk pernikahan terus berlanjut meskipun konteks ekonomi yang melatarinya telah berubah.

Apakah Negara Masih Dapat Menjamin *Human Security*?

Selain tiga pertanyaan yang dibahas dalam penelitian ini, penelitian ini juga mencoba untuk memproyeksikan trajektori yang cukup jelas untuk kedepannya. Proyeksi ini dibangun di atas logika struktural yang telah dibangun oleh penjelasan diatas, bukan hanya sekedar prediksi spekulatif, melainkan ekstrapolasi yang terbatas dan terukur dari kondisi yang sudah ada. Apakah negara Jepang masih memiliki kapasitas untuk menjamin *human security* warganya?

1. *Demographic Forecasting* : Bagaimana Data Memperlihatkan Realitanya.

National Institute of Population and Social Security Research (NIPSSR) Jepang memberikan proyeksi yang memprihatinkan. Dalam proyeksi terbarunya diperkirakan bahwa populasi Jepang akan turun dari 125,7 juta penduduk pada tahun 2020 menjadi 87 juta pada tahun 2070. Penurunan 30,8% dalam 50 tahun dengan ratio penuaan yang akan meningkat dari 29,9% menjadi 38,7% pada 2070 (National Institute of Population and Social Security Research, 2023). Yang lebih ironisnya, rumah tangga satu orang telah menjadi bentuk rumah tangga terbesar di Jepang. dengan total 18,5 juta rumah tangga atau 34% dari seluruh rumah tangga pada tahun 2023 (Nippon.com, 2024). Dari perspektif *human security*, tren ini menjadi sangat penting sebab proyeksi NIPSSR menunjukkan bahwa jumlah lansia usia 65 tahun ke atas yang hidup sendiri akan terus meningkat pada beberapa dekade mendatang, memperbesar populasi lansia yang tidak memiliki jaringan keluarga sebagai sistem pendukung primer. Jepang akan menghadapi tekanan yang semakin besar dari sektor sistem pensiun, layanan kesehatan, dan perawatan lansia akibat proporsi penerima manfaat meningkat sementara proporsi kontributor menurun.

2. Respon Negara dan Keterbatasan Regulasi dalam menghadapi Persoalan Struktural

Proyeksi kedua ini akan memberikan prediksi dalam bentuk pertanyaan: seberapa jauh regulasi yang dikeluarkan oleh negara dapat menjadi jawaban yang efektif terhadap persoalan yang akarnya berada pada kondisi struktural kapitalisme? Jika kita melihat Jepang saat ini tentunya mereka tidak hanya tinggal diam melihat kondisi negaranya yang sedang dilanda ancaman krisis serius, melihat dari bagaimana pemerintah Jepang mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mencoba mengembalikan kondisi demografi Jepang seperti semula, dimulai dari program subsidi kelahiran yang diambil dari pajak, peningkatan tunjangan anak yang juga dari pajak, perpanjangan cuti melahirkan berbayar, mulai membangun fasilitas penitipan anak agar orang tua bisa fokus kerja tanpa khawatir anaknya tidak terurus, hingga inisiatif untuk menetapkan *work-life balance* dengan cara pengurangan jam kerja. Tidak hanya itu, pemerintah Jepang juga mengintervensi dengan menyediakan layanan perjodohan dan program intensif menikah yang dibiayai penuh oleh negara guna untuk mengatasi krisis demografi yang berkelanjutan ini. Dilansir dari CNBC Indonesia (Salsabilla, 2023) layanan ini bisa dijumpai di

beberapa prefektur seperti di Miyagi, Ehime, dan Miyazaki. Menunjukkan betapa seriusnya Jepang ingin mengatasi persoalan demografi ini.

Namun penelitian ini melihat adanya celah dari semua inisiatif yang dikeluarkan oleh negara yang perlu diakui dan diamati dengan lebih, yakni bahwa setiap regulasi yang didesain untuk mendorong pernikahan dan kelahiran beroperasi pada level insentif atau individu, sementara persoalan yang dihadapi levelnya berada pada tingkat rasionalitas struktural yang jauh lebih dalam. Negara mencoba untuk mengubah perilaku individu melalui mekanisme *reward* dan *punishment*, sementara membiarkan struktur yang memproduksi perilaku tersebut tetap tidak terganggu. Subsidi kelahiran dan tunjangan anak memang dapat mengurangi biaya finansial ketika individu memiliki anak, tetapi tidak akan mengubah kenyataan bahwa pasar kerja di Jepang masih sangat tidak ramah terhadap keseimbangan antara mengejar karier dan membangun keluarga. Layanan pencarian jodoh yang disubsidi memang dapat mempertemukan individu-individu yang memiliki keinginan untuk menikah, tapi tidak dapat mengubah kenyataan bahwa bagi sebagian besar dari mereka masih belum memiliki kemampuan ekonomi yang mumpuni seperti yang dipersyaratkan. Karena selama kapitalisme di Jepang terus menerus memproduksi prekarisasi kerja dalam skala yang masif, dan selama tidak ada perubahan yang bersifat lebih mendasar dalam mengatur sistem perlindungan sosial yang mengakomodasi individu diluar skema pernikahan konvensional, maka regulasi-regulasi serta kebijakan yang telah dikeluarkan hanya mampu memperlambat tren yang sudah berjalan, bukan untuk mengatasi ataupun mengembalikannya seperti semula.

Penulis melihat adanya hal yang lebih mengkhawatirkan, yakni jika ditinjau dari perspektif *human security*, keterbatasan respons yang bisa dilakukan negara ini bukan hanya berarti bahwa fenomena *mikonka* ini akan terus berlanjut, tetapi juga akan berarti bahwa *security gap* yang ada saat ini akan terus melebar. Ketika proporsi populasi yang hidup diluar institusi keluarga konvensional semakin besar, semakin besar pula kesenjangan antara sistem perlindungan sosial yang ada dengan kebutuhan nyata dari populasi yang tidak terlayani oleh sistem tersebut. Jika tidak ada reformasi struktural yang berani dikeluarkan Jepang untuk merespons kapitalisme untuk melindungi hubungan kerja dan perlindungan sosial, maka kondisi *human security* di Jepang secara sistemik akan semakin melemah. Bukan dengan cara yang tiba-tiba dan spontan, tetapi secara gradual dan kumulatif, hingga pada satu titik dampak kumulatifnya tidak lagi dapat diselesaikan melalui kebijakan inkremental.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena *mikonka* di Jepang tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pilihan gaya hidup individual, perubahan preferensi generasi muda, atau persoalan demografi semata. Melalui perspektif *human security* dan konsep *enabling structure*, penelitian ini menemukan bahwa *mikonka* ini merupakan produk dari transformasi kapitalisme Jepang yang secara bertahap mengubah kondisi struktural dengan runtuhnya *bubble economy* pada awal 1990-an diikuti oleh meningkatnya prekarisasi kerja, melemahnya jaminan pekerjaan seumur hidup (*shuushin koyou*), serta meningkatnya ketidakpastian ekonomi akhirnya mengubah pernikahan dari institusi sosial yang dianggap alamiah menjadi proyek ekonomi jangka panjang yang membutuhkan fondasi material yang semakin sulit dicapai. sehingga menciptakan kondisi-kondisi struktural di mana *mikonka* menjadi pilihan yang semakin rasional, lebih dapat diterima, dan menjelma menjadi suatu pilihan strategis bagi individu Jepang

Penelitian ini juga menemukan bahwa dampak transformasi tersebut tidak hanya sekedar indikator penurunan angka pernikahan dan fertilitas. *Mikonka* juga berimplikasi pada dimensi *economic security* yang mengancam individu dengan ketidakpastian ekonomi yang menyulitkan untuk membangun komitmen jangka panjang. Pada dimensi *personal security*, meningkatnya isolasi sosial dan fenomena *kodokushi* menunjukkan adanya pelemahan jaringan dukungan interpersonal. Sementara pada dimensi *community security*, meningkatnya jumlah individu yang hidup sendiri dan melemahnya institusi keluarga berkontribusi terhadap proses atomisasi sosial yang semakin meluas.

Hal yang perlu dilihat juga bahwa pergeseran norma sosial secara kolektif terjadi bukan hanya karena perihalan tekanan ekonomi, tetapi ketika di saat yang bersamaan, kapitalisme juga menyediakan alternatif-alternatif yang lain untuk memenuhi kebutuhan manusia yang sebelumnya hanya dapat dipenuhi oleh institusi pernikahan. Meskipun begitu, fakta bahwa sebagian individu tetap memilih untuk menikah didalam struktur kapitalisme yang sama membuktikan bahwa agensi tetap memiliki kendali dan bisa beroperasi secara signifikan, hanya saja agensi tersebut telah dibentuk oleh perbedaan nilai personal yang dipengaruhi oleh pengalaman sosialisasi pada fase historis kapitalisme yang berbeda-beda, bukan hanya dari kondisi ekonomi semata.

Jika melihat lebih mendalam, penelitian ini juga menemukan bahwa dampak dari *mikonka* terhadap *human security* tidak bersifat sesaat, namun bersifat kumulatif dan sistemik. Generasi *mikonka* saat ini terancam menjadi populasi lansia lajang di masa depan, yang mana lansia lajang ini akan rentan terhadap keamanan personal termasuk salah satunya adalah meningkatnya *kodokushi* atau kematian sendiri dalam waktu yang lama sebagai akibat dari melemahnya jaringan keluarga sebagai *support system* yang memadai. Sedangkan di saat yang sama, respons kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang hingga saat ini terbukti masih memiliki hambatan untuk mengatasi masalah ini, sebab kebijakan yang dikeluarkan bergerak pada level individual, sementara penelitian ini melihat bahwa akar persoalan masalahnya terletak pada rasionalitas struktural yang jauh lebih dalam. Selama kapitalisme Jepang terus memproduksi prekarisasi kerja tanpa dibersamai oleh reformasi mendasar dalam arsitektur sistem perlindungan sosial yang ada maka *security gap* antara sistem yang ada dengan kebutuhan nyata masyarakat diluar skema pernikahan konvensional akan terus melebar secara perlahan tapi pasti. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa *mikonka* merupakan salah satu bentuk *slow violence* terhadap *human security*, sebab ia bekerja secara perlahan melalui perubahan struktur ekonomi, norma sosial, dan relasi interpersonal hingga akhirnya menciptakan berbagai bentuk kerentanan yang baru. Fenomena ini memperlihatkan bahwa ancaman terhadap keamanan manusia tidak selalu nampak dalam bentuk konflik bersenjata atau bencana alam, tetapi juga dapat muncul melalui transformasi sosial yang berlangsung secara gradual dalam kehidupan sehari-hari.

SARAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diketahui terlebih dahulu. Pertama, sebagai studi kasus tunggal, seluruh temuan didalam penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan secara langsung apabila ingin melihat fenomena serupa di negara lain, bak serupa namun tak sama, meskipun kerangka kapitalisme sebagai *enabling structure* yang ditawarkan dalam penelitian ini memiliki kemungkinan untuk diadaptasi sesuai dengan kondisi negaranya. Kedua, penelitian yang ditawarkan ini sepenuhnya mengandalkan data sekunder, seperti dari dokumen resmi, laporan lembaga internasional, buku-buku penunjang, serta data statistik yang kredibel, hingga sumber kanal berita terpercaya. Sehingga belum mampu untuk menangkap secara mendalam pengalaman subjektif, persepsi, serta rasionalitas individu Jepang dalam memaknai pernikahan, keluarga, dan pilihan hidup di tengah perubahan sosial yang berlangsung. Ketiga, dimensi proyektif yang dibangun dalam penelitian ini bersifat ekstrapolatif atau memperkirakan kejadian diluar data yang telah diketahui, dengan menggunakan pola tren yang sudah ada, dan bersifat terbatas sebab ia tidak dimaksudkan sebagai prediksi yang mutlak terjadi, melainkan sebagai pembacaan dan identifikasi yang logis atas trajektori struktural yang sudah dapat diobservasi saat ini. Oleh karena itu, Penulis menyarankan untuk kepenulisan selanjutnya untuk dapat mengeksplorasi dimensi komparatif dengan negara-negara lain yang juga berada di kawasan Asia Timur seperti Korea Selatan dan Tiongkok, maupun negara-negara berkembang atau maju lain yang mengalami permasalahan penurunan demografi yang sama. Selain itu, penelitian bisa dilakukan dengan menggunakan metode campuran yang mengombinasikan data sekunder dengan data primer melalui wawancara, survei, maupun

observasi lapangan yang akan memberikan pemahaman lebih baik dan komprehensif mengenai pengalaman hidup mereka yang berada di balik fenomena *mikonka* ini, serta mendalami efektivitas kebijakan-kebijakan intervensi yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang dalam menghadapi ancaman *human security* di Jepang, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih kontekstual, berkelanjutan, dan responsif terhadap transformasi sosial yang terus berlangsung

REFERENSI

- Agusriyani, L. R., Waddiny, N. N., & Hafidzi, A. (2025). DINAMIKA SISTEM KOSEKI: PENGARUH BUDAYA DAN MODERNISASI TERHADAP PERKAWINAN DI JEPANG. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic, and Legal Theory*, 3(2), 1742–1743.
<https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1165>
- Bauman, Zygmunt. (2012). *Liquid modernity*. Polity Press.
- David Creswell, J., & William Creswell, J. (2023). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6th ed.). SAGE Publication.
- Davies, T. (2022). Slow violence and toxic geographies: 'Out of sight' to whom? *Environment and Planning C: Politics and Space*, 40(2), 409–427.
<https://doi.org/10.1177/2399654419841063>
- Davika, J. (2021). *Hubungan antara Kematangan Emosi dengan Kesiapan Menikah pada Dewasa Awal*. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/cjpp.v8i7.44194>
- Giddens, Anthony. (1984). *The Constitution of Society : Outline of the Theory of Structuration*. Polity.
- Grand View Research. (2025). *Japan Ai Companion Market Size & Outlook, 2026-2033*.
- Japan Institute for Labour Policy and Training. (2016). *Non-regular Employees Comprise More Than One Third of Total Employees*.
- Japan Society. (2023, November 6). The Bubble Economy and the Lost Decade. *Japan Society*, 1.
<https://japansociety.org/news/the-bubble-economy-and-the-lost-decade/>
- Kaldor, M. (2024). Global Governance and Human Security. In *Global Governance and International Cooperation: Managing Global Catastrophic Risks in the 21st Century* (pp. 175–192). Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781032699028-13>
- Koji, T. (2023). Non-Regular Employment Measures in Japan. *Japan's Employment System and Public Policy*, 7(44), 53,55. <https://www.jil.go.jp/english/jli/documents/2023/044-05.pdf>
- Kuokkanen, A. (2025). *Masculinity in Transition: Contrasting the Salaryman Ideal with Irregular Male Identities in Japan*.
- Malang International School. (2018, May 5). Fenomena Bankonka dan Mikonka di Jepang. *Malang International School*. <https://mislanguageschool.co.id/kursus/bahasa-jepang/artikel/23/fenomena-bankonka-dan-mikonka-di-jepang>
- Malik, W., & Gul, S. (2024). Bridging the Gap Exploring the Intersection of Cybersecurity and Human Security in the Digital Age. *Competitive Research Journal Archive*, 2(Vol. 2 No. 04 (2024): Competitive Research Journal Archive (Oct-Dec)), 197.
https://www.researchgate.net/profile/Wasmiya-Malik-2/publication/388629225_Bridging_the_Gap_Exploring_the_Intersection_of_Cybersecurity_and_Human_Security_in_the_Digital_Age/links/679f984b52b58d39f2669137/Bridging-the-Gap-Exploring-the-Intersection-of-Cybersecurity-and-Human-Security-in-the-Digital-Age.pdf
- MCcurry, J. (2024, July 1). Life at the heart of Japan's lonely deaths epidemic: 'I would be lying if I said I wasn't worried.' *The Guardian*.
- Ministry of Health Labour And Welfare Japan. (2024). *VITAL STATISTICS OF JAPAN 2023*.
- Muhammadun, & Fauzi, N. (2025). *KELUARGA DALAM PUSARAN KAPITALISME: ANALISIS DAMPAK EKONOMI TERHADAP KELUARGA MUSLIM* (Vol. 3).
<https://www.jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/851/467>

- National Institute of Population and Social Security Research. (2023). *Population Projections for Japan (2023 Revision): 2021 to 2070 – Summary of Results*. https://www.ipss.go.jp/pp-zenkoku/e/zenkoku_e2023/pp_zenkoku2023e.asp
- Nippon.com. (2024, August 6). One in Three Japanese Households Consist of Just One Person. *Nippon.Com*.
- Park, H. (2021). Introduction to the Special Collection on Family Changes and Inequality in East Asia. *Demographic Research*, 44, 979–992. <https://doi.org/10.4054/DemRes.2021.44.40>
- Raymo, J. M., Uchikoshi, F., & Yoda, S. (2022). Marriage intentions, desires, and pathways to later and less marriage in Japan. *Demographic Research*, 41, 67–98. <https://doi.org/10.4054/DEMRES.2021.44.3>
- Rios, J. A. (2021). Deadly Obsessions: Cultural Influences Behind Karoshi. *Wittenberg University East Asian Study*, 44, 36. <https://data.oecd.org/emp/hours-worked.htm>.
- Sahlaa, A. (2025). Ketika Ancaman Tidak Lagi Berwujud Senjata: Refleksi Keamanan di Era Pasca-Pandemi. *FISIP UIN Jakarta*. <https://fisip.uinjkt.ac.id/id/ketika-ancaman-tak-lagi-berwujud-senjata-refleksi-keamanan-di-era-pasca-pandemi>
- Salsabilla, Ri. (2023, February 23). Pemerintah Jepang Mau Jodohkan Warganya Yang Pada Ogah Nikah. *CNBC Indonesia*.
- Setyarto, A., & Jibrani, M. (2023). KERJASAMA JEPANG-KENYA SEBAGAI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI JEPANG DALAM MENGEDEPANKAN HUMAN SECURITY. In *Jurnal Pena Wimaya* (Vol. 3, Number 2). <https://doi.org/https://doi.org/10.31315/jpw.v3i2.8548>
- Shoji, K. (2025, April 30). Japan embraces the solo lifestyle. *Asia Nikkei*.
- Streeck, W. (2025). Social Contract or Expert Rule: Capitalism, Democratic Politics, Economic Expertise, and the Battle against “Populism.” *Critical Review*, 410. <https://doi.org/10.1080/08913811.2025.2542013>
- Sulastari, N., & Damayanti, S. (2022). TEMPORARY WORKER ALIENATION IN HIROKO OYAMADA’S NOVEL KOUJOU. *Jurnal Kata*, 6(2), 202–215. <https://doi.org/10.22216/kata.v6i2.767>
- UNDP. (2022). *New threats to human security in the Anthropocene Demanding greater solidarity*. <http://hdr.undp.org>.
- Wedayanti, L., & Dewi, A. (2021). SISTEM IE TERKAIT PEWARIS PADA KELUARGA TRADISIONAL JEPANG. *JPBJ*, 7(1), 92. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpbj.v7i1.29731>
- Yukie, H. (2023). Youth Employment and Employment Policies in Japan. *Japan’s Employment System and Public Policy*, 7(41), 51–53. https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/timeseries/html/g0303_03.html.